LAPORAN KEBERLANJUTAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PT. BPR PALEMBANG
TAHUN 2024

Bank Palembang
PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang
Bank Milik Pemerintah Kota Palembang

Jalan Sukarno Hatta No. 10 RT. 048, RW. 010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang
TELEPON: 0711-5564777

Daftar Isi

Daftar Isi *i*

Kata Pengantar *ii*

1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan *1*

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan *5*

3. Profil Bank *9*

4. Penjelasan Direksi *13*

5. Tata Kelola Keberlanjutan *16*

6. Kinerja Keberlanjutan *23*

   6.1. Kinerja Ekonomi *23*

   6.2. Kinerja Sosial *25*

   6.3. Kinerja Lingkungan Hidup *28*

   6.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan *29*

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen *31*

Umpan Balik *31*

Kata Pengantar

Dalam memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR PALEMBANG berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya. **Tahun 2024** merupakan tahap awal implementasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan di BPR Palembang, Sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK), BPR (Bank Perekonomian Rakyat) menyadari pentingnya pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan berfokus pada prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan bisnis Bank, dengan menyeimbangkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

BPR PALEMBANG, bertindak selaku perantara *(intermediary institution)* yang menghimpun dana publik (DPK) untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian, BPR wajib berhati- hati dalam menyalurkan kredit, menjauhi usaha yang berdampak buruk pada lingkungan, mengutamakan bisnis yang meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sekaligus, mendapatkan profit dari bunga pinjaman tersebut.

Sebagai bentuk komitmen, BPR PALEMBANG berusaha menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Tindakan ini selaras dengan usaha bersama Industri Jasa Keuangan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP). Selain itu, langkah ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bank, karena mengabaikan masalah sosial dan lingkungan dapat menyebabkan risiko, khususnya risiko kredit karena potensi gagal bayar *(default)* nasabah yang bisnisnya berdampak buruk pada lingkungan dan menghambat peningkatan kemakmuran masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) BPR PALEMBANG tahun 2024 ini memaparkan data dan informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank, meliputi bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang diperuntukkan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan ketentuan OJK, BPR PALEMBANG, dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, untuk pertama kalinya menyusun Laporan Keberlanjutan pada tahun 2025, yaitu untuk periode Laporan Keberlanjutan Tahun 2024. Laporan ini harus disampaikan secara fisik kepada OJK selambat-lambatnya sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan. Dengan demikian, BPR PALEMBANG menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 yang mencakup informasi periode pelaporan mulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.*(offline)*.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan POJK No. 51/ POJK.03/2017 untuk sektor Perbankan.

1.
Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) merupakan dokumen publik resmi yang disusun untuk menginformasikan masyarakat luas mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, serta dampak terhadap lingkungan hidup yang dicapai oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, atau perusahaan publik. Publikasi ini disusun dalam rangka menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan serta memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

Pada tahap awal ini, Strategi Keberlanjutan dalam pemenuhan kelengkapan Struktur Organisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan adanya pondasi yang kuat dalam perencanaan, koordinasi, serta pengawasan implementasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional.

Selain pemenuhan kelengkapan Struktur Organisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan BPR Palembang juga pada penyusunan pedoman dan kebijakan internal yang mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan. Pedoman ini akan menjadi acuan dalam menetapkan langkah-langkah strategis, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam proses ini, kami juga mengupayakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan sosialisasi terkait prinsip Keuangan Berkelanjutan. Dengan membangun pemahaman yang kuat di seluruh jajaran manajemen.

Sesuai dengan Lampiran 2 POJK tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan, format penulisan untuk Laporan Keberlanjutan adalah seperti yang tertera berikut

1. Uraian tentang Strategi Pembangunan Berkelanjutan
2. Tinjauan atas Performa Bidang Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)
3. Ikhtisar Profil BPR/BPRS
4. Uraian dari Jajaran Direksi
5. Pengelolaan keberlanjutan
6. Performa terkait dengan keberlanjutan
7. Konfirmasi secara tertulis yang berasal dari pihak ketiga yang independen
8. Formulir tanggapan *(feedback)* bagi para pembaca dan
9. Respon BPR/BPRS atas masukan yang diterima terkait laporan tahunan sebelumnya.

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Dokumen Laporan Keberlanjutan BPR PALEMBANG Tahun 2024 disusun dengan mematuhi

ketentuan dan standar yang ditetapkan dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan yang disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2024. BPR PALEMBANG menyusun dan melaporkan kinerja keberlanjutan untuk satu periode tahun buku yang dimulai pada tahun 2024. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 mencakup data serta penjelasan yang dikumpulkan selama satu tahun penuh, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

Penetapan ruang lingkup penyajian informasi dalam Laporan ini didasarkan pada POJK No. 51/ POJK.03/2017 serta disusun dengan merujuk pada dua prinsip utama, yakni prinsip isi dan prinsip kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

D alam Laporan ini mencakup permasalahan yang telah diutamakan oleh organisasi untuk dicantumkan parameter yang digunakan untuk menetapkan prioritas meliputi pengaruh terhadap sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk pula efek yang bernilai positif. Penetapan ruang lingkup dan batasan penyajian didasarkan pada permasalahan yang memiliki dampak signifikan bagi BPR PALEMBANG serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR PALEMBANG adalah:

1. **Investasi Bertanggung Jawab;** Penerapan prinsip investasi berwawasan mencakup pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi guna memitigasi risiko secara optimal. Dalam pelaksanaannya, BPR PALEMBANG menyalurkan kredit dengan melakukan analisis mendalam terhadap potensi risiko dari kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2. **Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Prinsip ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi BPR PALEMBANG dalam menjalankan operasional bisnis yang sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan.
3. **Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup;** BPR PALEMBANG menerapkan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan mekanisme kehati-hatian (Prudential Banking) dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR). Selain mengelola risiko finansial, Bank juga secara khusus menilai risiko kredit yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan guna mencegah timbulnya dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Tata Kelola;** Implementasi tata kelola berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik operasional telah sesuai dengan standar hukum serta kebijakan yang berlaku.
5. **Komunikasi yang Informatif;** Prinsip komunikasi yang informatif tersaji melalui penyediaan laporan komprehensif yang memuat strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek Bank. Laporan tersebut disusun agar mudah diakses oleh para pemangku kepentingan melalui situs resmi BPR PALEMBANG (https://bankbprpalembang.com).
6. **Inklusif;** Dalam rangka menjamin akses yang merata, BPR PALEMBANG memastikan produk dan/ atau jasa keuangan yang ditawarkan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh nasabah, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan yang setara.
7. **Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas;** Dalam menyusun program keberlanjutan, BPR PALEMBANG mempertimbangkan sektor-sektor strategis yang telah ditetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Pendekatan ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus mengakomodasi program pemerintah dalam penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Koordinasi dan Kolaborasi;** Prinsip ini menegaskan komitmen Bank untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah setempat dalam rangka menyelaraskan strategi keberlanjutan. Bentuk keterlibatan ini tercermin melalui keanggotaan BPR PALEMBANG di Perbarindo serta partisipasinya dalam berbagai kegiatan yang memberdayakan masyarakat..

Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.

3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lainmenyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.

Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan tidak semata- mata diwujudkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, melainkan juga sebagai strategi integral untuk merealisasikan visi Bank, khususnya melalui penerapan prinsip inklusi keuangan.

Bank menetapkan segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai sasaran utama dalam penyediaan layanan keuangan, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/atau layanan keuangan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan, Bank berupaya memperkuat perannya dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif, antara lain penyusunan rencana kerja dan pengembangan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR PALEMBANG telah mengimplementasikan prinsip-prinsip perusahaan ramah lingkungan (*go green company*) sebagai bagian dari penerapan Keuangan Berkelanjutan. Langkah-langkah yang telah ditempuh meliputi:

1. **Kampanye Efisiensi Air:** Pemasangan pamflet di setiap toilet kantor yang memuat anjuran seperti "Gunakan air seperlunya," "Hemat air," atau "Matikan air setelah selesai digunakan" untuk mendorong penggunaan air yang efisien.
2. **Promosi Lingkungan Kerja Sehat:** Penggunaan slogan "BERSIH itu SEHAT" yang ditempel di lokasi strategis guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih bersih dan sehat.
3. **Program Hemat Energi:** Pelaksanaan inisiatif pengurangan konsumsi energi dengan membatasi penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja serta mematikan lampu di ruang yang tidak digunakan.
4. **Penggunaan Tumbler:** Penerapan program penggantian gelas air minum atau air dalam kemasan dengan tumbler sebagai upaya mengurangi penggunaan produk sekali pakai.

2.
Ikhtisar Aspek Keberlanjutan

Aspek Ekonomi

Tabel 2.1 Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Pendapatan Operasional Bank (Rp)	26.284.498.777	21.348.573.932	12.860.394.063
Laba Bersih Bank (Rp)	6.711.671.838	5.197.529.325	-493.383.118
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	2	1	1
Nominal produk penghimpunan dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	18.579.398	0	0
Nominal produk penyaluran dana kredit yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	1.826.916.600	3.993.549.967	3.524.800.000
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Dana (%)	0,11	0	0
b. Penyaluran Dana (%)	1,86	4,82	5,65
Kinerja Keuangan Inklusif			
Perkembangan Laku Pandai			
a. Jumlah Agen	0	0	0
b. Nominal produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Agen	0	0	0

Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kategori Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran dana.

Aspek Lingkungan Hidup

Tabel 2.2 Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Beban Penggunaan Kertas (Rp)	68.740.350	15.789.400	38.529.509
Beban Penggunaan Listrik (Rp)	96.651.260	115.269.606	113.130.685
Beban Penggunaan Air (Rp)	3.265.702	11.108.690	6.399.120
Beban Penggunaan BBM (Rp)	91.110.087	89.484.330	73.330.400

Kriteria Kredit Usaha Berkelanjutan (KUB) yang layak untuk didukung oleh lembaga keuangan mencakup efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bank memahami bahwa upaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha yang memperhitungkan dampak lingkungan harus dimulai dari penerapan praktik operasional yang berkelanjutan dalam lingkup internal Bank.

Sebagaimana tercantum dalam RAKB 2024, Bank telah menetapkan operasional ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi utama keuangan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional mempertimbangkan aspek lingkungan, penting bagi Bank untuk menanamkan budaya kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, Bank berkomitmen melakukan pemantauan dan pengelolaan data lingkungan di kantor sepanjang tahun 2024.

Sebagai bagian dari implementasi operasional yang ramah lingkungan, Bank telah melaksanakan sosialisasi di lingkungan kerja serta menerbitkan Surat Kewaspadaan yang memuat informasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari budaya perusahaan yang berorientasi pada kepedulian lingkungan.

Efisiensi Penggunaan Kertas

Kertas merupakan komponen esensial dalam operasional Bank, terutama dalam berbagai kegiatan administrasi perkantoran, seperti penyusunan surat-menyurat, pencatatan memo, pencetakan laporan perusahaan, penerbitan buku nasabah, pencatatan transaksi keuangan (meliputi setoran, penarikan, dan lain sebagainya). Bank menyadari bahwa bahan baku pembuatan kertas adalah bubur kayu yang diperoleh dari penebangan pohon. Oleh karena itu, Bank berupaya mengoptimalkan penghematan penggunaan kertas agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pengurangan eksploitasi sumber daya hutan serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2024, beban penggunaan kertas meningkat secara signifikan mencapai Rp60.121.100. Kenaikan ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 15.789.400 menunjukkan lonjakan yang sangat besar. Namun, perlu dicatat bahwa lonjakan ini bukan

disebabkan oleh pola konsumsi reguler, melainkan karena adanya proses pemusnahan dokumen terkait perubahan nomenklatur organisasi. Kegiatan tersebut mengharuskan pencetakan ulang berbagai dokumen administratif untuk menyesuaikan dengan identitas baru unit kerja. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp30.158.800, beban tahun 2024 memang dua kali lipat lebih besar, namun dipandang sebagai konsekuensi dari kebutuhan penyesuaian kelembagaan, bukan indikasi pemborosan. Oleh karena itu, lonjakan ini bersifat insidental dan diharapkan tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.

Di masa mendatang, penerapan digitalisasi pelaporan yang diinisiasi oleh OJK melalui POJK Nomor 23 Tahun 2024, yang mengalihkan penyampaian laporan dari metode luring ke daring, diharapkan dapat mendukung pengurangan penggunaan kertas di industri BPR guna mewujudkan sistem operasional yang lebih efisien dan berorientasi pada prinsip paperless.

Efisiensi Penggunaan Listrik

Penggunaan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan dan penggerak sarana-prasarana kantor — seperti mesin fotokopi, AC, dan komputer — didukung oleh kebijakan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang diterapkan oleh bank. Penggunaan PLTG merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber energi yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap jaringan listrik komersial sekaligus mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam konteks ini, bank menjalankan prinsip efisiensi energi dan konservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta mendukung target-target nasional yang termuat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemanfaatan PLTG tidak hanya mampu menstabilkan pasokan listrik pada saat beban puncak atau ketika terjadi gangguan pada jaringan PLN, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan biaya operasional karena efisiensi konversi energi gas menjadi listrik lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil lainnya. Dengan demikian, penerapan teknologi ini mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip keberlanjutan dan efisiensi dalam penggunaan energi.

Berdasarkan tabel diatas, p enggunaan listrik menunjukkan perbaikan yang nyata dari sisi efisiensi. Pada tahun 2024, beban listrik tercatat sebesar Rp96.651.260, mengalami penurunan sebesar Rp18.618.346 atau sekitar 16% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp115.269.606. Penurunan ini menandakan keberhasilan program efisiensi energi, seperti penerapan penggunaan lampu hemat energi, pengaturan jam operasional perangkat elektronik, serta peningkatan kesadaran pegawai untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Dibandingkan dengan tahun 2022 (Rp113.130.685), penurunan ini juga konsisten, yang menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi telah diimplementasikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap pengurangan biaya operasional.

Efisiensi Penggunaan Air

Pada aspek penggunaan air, efisiensi yang dicapai sangat menonjol. Beban penggunaan air pada tahun 2024 hanya sebesar Rp3.265.702, turun drastis dibandingkan dengan tahun 2023

sebesar Rp11.108.690. Penurunan ini mencapai 70%, yang merupakan hasil dari berbagai inisiatif efisiensi seperti perbaikan sistem perpipaan untuk mengurangi kebocoran, penggunaan perangkat sanitasi hemat air, dan kampanye penghematan air di lingkungan kantor. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 (Rp6.399.120), beban tahun 2024 masih menunjukkan penurunan lebih dari 48%, yang mengindikasikan bahwa efisiensi dalam penggunaan air telah dijaga dan ditingkatkan secara signifikan selama dua tahun terakhir.

Efisiensi Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak)

Beban penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp91.110.087, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp89.484.330. Meskipun terjadi kenaikan sebesar sekitar 1,8%, laju pertumbuhannya jauh lebih lambat dibandingkan lonjakan dari tahun 2022 ke 2023 (dari Rp73.330.400 ke Rp89.484.330 atau sekitar 22%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsumsi BBM belum mengalami penurunan, pengelolaannya mulai menunjukkan tren yang lebih stabil.

BBM digunakan tidak hanya untuk mengoperasikan genset sebagai sumber daya cadangan saat terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN, tetapi juga untuk mendukung kendaraan operasional kantor. Kendaraan ini digunakan untuk menunjang mobilitas dalam pelaksanaan kegiatan administratif, pengawasan, dan pelayanan di lapangan. Jenis BBM yang digunakan oleh bank mencakup bensin (gasoline) untuk kendaraan berbasis mesin bensin, serta solar (diesel) untuk kendaraan berbasis mesin diesel dan untuk pengoperasian genset.

Aspek Sosial

Tabel 2.3 Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Dana Sosial Yang Disalurkan	50.402.000	7.300.000	1.800.000

Penyaluran dana sosial oleh institusi mengalami peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat alokasi sebesar **Rp50.402.000**, meningkat drastis dibanding tahun 2023 (Rp7.300.000) dan tahun 2022 (Rp1.800.000). Kenaikan ini mencerminkan peningkatan komitmen institusi dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Secara terminologi, dana sosial ini merupakan bagian dari **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)** sebagaimana diatur dalam **Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, Pasal 74. Kewajiban ini juga diperkuat oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017** tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

3.
Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	**PT BPR PALEMBANG**
Alamat	**Jl. Sukarno Hatta No. 10 RT. 048 RW. 010 Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1**
Nomor Telepon	**07115564777**
Email	**bprpalembang@bankbprpalembang.cpm**
Website	**https://bankbprpalembang.com/**

Skala Usaha Bank

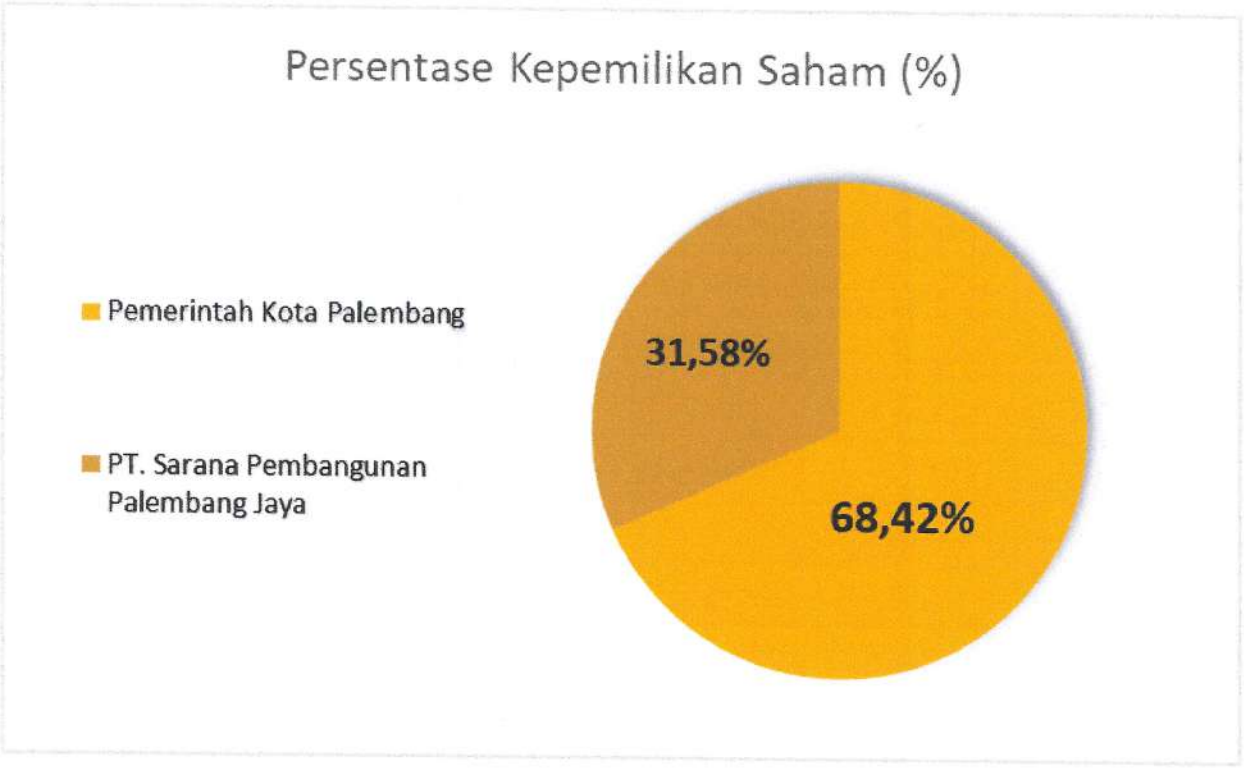
Total Aset dan Kewajiban

Jumlah aset di tahun 2024 sebesar Rp 129,612,302,612 mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. Demikian juga kewajiban mengalami peningkatan dari tahun - tahun sebelumnya menjadi Rp 89,389,805,123

Deskripsi	2024	2023	2022
Aset	Rp 129,612,302,612.00	Rp 112,860,795,594.27	Rp 85,520,188,970.00
Kewajiban	Rp 89,389,805,122.65	Rp 79,207,083,140.52	Rp 57,064,062,668.00

Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Saham	Jumlah Saham (Rp)
1.	Pemerintah Kota Palembang	260.000 lembar	68,42	Rp. 26.000.000.000,-
2.	PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya	120.000 lembar	31,58	Rp. 12.000.000.000,-
TOTAL		**380.000 lembar**	**100,00**	**Rp. 38.000.000.000,-**



Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2024 Bank memiliki SDM total 37 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum Pemerintah Kota Palembang. Demografi secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Produk dan Layanan

Jenis Produk	Deskripsi
Tabungan	Tabungan Pelajar Tabungan Pasar Perdana Tabungan Pasar Perdana non Perorangan
Deposito	Deposito Pasar Perdana Deposito Suka – Suka dan Plus
Kredit	Kredit PNS Kredit Sertifikasi Kredit Modal Kerja Kredit Multiguna Kredit Program Kredit Investasi

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi BPR yang beperan aktif dalam pembangunan ekonomi, tatanan kehidupan sosial masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

b. Misi Keberlanjutan

1. Meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat tentang peran bank sebagai lembagai intermediary.
2. Menghinpun Dana Masyarakat yang telah teredukasi melalui penawaran produk - produk funding perbankan yang menarik dan saling menguntungkan.
3. Menyalurkan Dana dalam bentuk Kredit ke debitur yang akan membantu permodalan dan pengembangan usaha debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
4. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada SDM sehingga memiliki SDM yang professional, jujur dan berintegritas tinggi.
5. Memahami risiko perbankan dan mengendalikan resiko tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
6. Mematuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

8. Melakukan kegiatan usaha berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan

c. Nilai - Nilai Berkelanjutan

1. Menjalankan usaha dengan transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi serta etika bisnis yang berkelanjutan
2. Mendorong akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan sektor ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan
3. Mengelola risiko lingkungan dengan mendukung pembiayaan hijau dan mengurangi dampak negatif operasional terhadap lingkungan
4. Berkontribusi terhadap pembangunan sosial melalui produk keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan
5. Mengembangkan solusi keuangan yang adaptif dan berbasis teknologi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan

Penjelasan Lainnya

BPR PALEMBANG mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.
Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aktivitasnya dengan menjadikan diri sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan unggul dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Penerapan Keuangan Berkelanjutan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Melalui integrasi prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis, nilai keberlanjutan bagi BPR Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha dengan transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi serta etika bisnis yang berkelanjutan
2. Mendorong akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan sektor ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan
3. Mengelola risiko lingkungan dengan mendukung pembiayaan hijau dan mengurangi dampak negatif operasional terhadap lingkungan
4. Berkontribusi terhadap pembangunan sosial melalui produk keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan
5. Mengembangkan solusi keuangan yang adaptif dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. BPR telah menetapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dengan cakupan lima tahun sebagai strategi jangka panjang. Selain itu, Bank juga menetapkan rencana aksi jangka pendek yang berlaku selama satu tahun dan telah disusun untuk tahun 2024. Target utama yang ingin dicapai adalah keterlibatan seluruh pegawai dalam sosialisasi penerapan keuangan berkelanjutan serta implementasi operasional perbankan yang berwawasan lingkungan. Laporan Keberlanjutan ini memuat komitmen, strategi, dan kinerja pencapaian Bank dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan. Adapun bentuk komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank *(prudential banking)* dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pencapaian Target

Bank terus memperkuat strategi keberlanjutan, terutama dalam upaya mitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal melalui berbagai langkah mitigasi yang telah diterapkan oleh Bank.

Salah satu tantangan utama dalam tahap awal penerapan keuangan berkelanjutan adalah membangun komunikasi yang efektif serta meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Kendati demikian, Bank meyakini bahwa ke depan terdapat peluang besar dalam penyaluran dana yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2024, BPR PALEMBANG terus berupaya meningkatkan kualitas layanan keuangan berkelanjutan. Bank berharap dapat menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator, serta asosiasi guna menciptakan nilai tambah bagi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Ke depan, BPR PALEMBANG akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan literasi keuangan berkelanjutan di seluruh jenjang organisasi, pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada aspek lingkungan dan sosial dalam operasional sehari-hari, pengembangan produk keuangan berkelanjutan, serta peningkatan portofolio pembiayaan yang mendukung usaha berwawasan lingkungan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, diperlukan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta penyelesaian berbagai permasalahan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Bank berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang timbul dari kegiatan operasional dan bisnisnya.

Apresiasi

BPR menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi mereka dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di BPR PALEMBANG. Dukungan dan

kepercayaan yang diberikan menjadi fondasi utama bagi Bank dalam menciptakan serta memperkuat nilai keberlanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat. Bank berharap agar seluruh pemangku kepentingan terus memberikan dukungan dan menjalin kerja sama yang konstruktif, sehingga Bank dapat berkembang secara berkelanjutan serta mengelola isu-isu keberlanjutan dengan lebih efektif.

5.
Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggung jawaban *(responsibility)*, independensi *(independency)*, dan kewajaran (*fairness)*. Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Pada tahun 2024 awal implementasi penerapan keuangan berkelanjutan BPR Palembang belum membentuk Unit Kerja khusus yang bertanggungjawab dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam penerapan *good corporate governance,* Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*frame work)* yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure)*, Proses Tata Kelola (*Governance Process)* dan Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)*. Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* secara berkesinambungan.

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Palembang berada pada organ tata kelola yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Tim Penanggungjawab Berkelanjutan.

1. **Dewan Komisaris**

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

a. Menyetujui Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang disampaikan oleh Direksi.
b. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan yang disampaikan oleh Direksi untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
c. Memastikan penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan bank oleh Direksi telah mempertimbangkan dan menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola
d. Memberikan masukan atas kinerja keberlanjutan dan/ atau keuangan berkelanjutan yang disampaikan oleh Direksi; dan

Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan strategi bisnis PT. BPR Palembang

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

a. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris
b. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris
c. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* kepada Dewan Komisaris
d. Memastikan strategi keberlanjutan secara keseluruhan sesuai dengan strategi PT. BPR Palembang
e. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank
f. Menyetujui Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Tim Penanggungjawab Keberlanjutan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
g. Melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja Tim Penanggungjawab Berkelanjutan beserta penerapan Keuangan Berkelanjutan di BPR Palembang

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR PALEMBANG berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR PALEMBANG secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPR PALEMBANG. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan Menjadi Ketua Tim Penanggungjawab Berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Tim Penanggungjawab Berkelanjutan yaitu

1. Direktur Kepatuhan
2. Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
3. Pejabat Eksekutif Kredit / Marketing (Fungsi Literasi dan Inklusi)
4. Pejabat Eksekutif Operasioal Umum dan SDM

Tim Penanggung jawab Berkelanjutan

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Penanggung jawab Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan yang membawahi Tim Penanggung jawab Keberlanjutan ditunjuk oleh

Direktur Utama sebagai Ketua, pemantau dan penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

1. Membentuk Tim Penanggung jawab Keberlanjutan
2. Memastikan bahwa Tim Penanggung jawab Berkelanjutan telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memimpin penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan
4. Bersama Tim Penanggung jawab Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Memastikan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan, implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, publikasi Laporan Keberlanjutan serta mengikuti perkembangan isu keuangan berkelanjutan
6. Bersama Tim Penanggung jawab Berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada setiap unit kerja mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, serta memastikan setiap unit kerja mendapatkan sosialisasi mengenai penerapan keuangan berkelanjutan
7. Melakukan pengawasan dan memastikan implementasi program keuangan berkelanjutan sejalan dengan strategi PT. BPR Palembang serta mempertimbangkan dan menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola

Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko ditunjuk oleh Direksi sebagai Tim Penanggung jawab Keberlanjutan, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan
3. Melakukan pemantauan portofolio kredit secara berkala dan memastikan telah diverifikasi sesuai dengan risk appetite bank;
4. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Penanggung jawab Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Penanggung jawab Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan
5. Bersama Tim Penanggung jawab Keberlanjutan menyampaikan hasil pelaksanaan pada butir nomor (4) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
6. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Bersama Tim Penanggung jawab Berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada setiap unit kerja mengenai penerapan keuangan berkelanjutan

Manager Marketing (Fungsi Literasi dan Inklusi)

Manager Marketing (Fungsi Literasi dan Inklusi) ditunjuk oleh Direksi sebagai Tim Penanggung jawab Keberlanjutan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Meningkatkan portofolio produk kredit dan dana yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan
2. Melakukan penyaluran kredit kepada kegiatan usaha berkelanjutan sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan PT. BPR Palembang
3. Melaksanakan tugas sebagai Fungsi Literasi dan Inklusi sesuai dengan rencana dan target pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
4. Bertanggungjawab pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan di bidang bisnis, Fungsi Literasi dan Inklusi
5. Berkoordinasi bersama Tim Penanggungjawab Keberlanjutan untuk Rencana, penyusunan dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan

Manager Operasioal Umum dan SDM

Manager Operasioal Umum dan SDM ditunjuk oleh Direksi sebagai Tim Penanggung jawab Keberlanjutan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun program pengembangan dan pendidikan terkait penerapan keuangan berkelanjutan
2. Menyusun daftar pegawai BPR Palembang yang telah mendapatkan pelatihan keuangan berkelanjutan setiap tahunnya
3. Menyusun Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Direksi dan diunggah pada situs web milik BPR Palembang sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
4. Berkoordinasi bersama Tim Penanggung jawab Keberlanjutan untuk rencana, penyusuan dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan
5. Memantau pelaksanaan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi keuangan berkelanjutan khusus dibidang operasional Umum dan SDM.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Sehubungan dengan belum dibentuknya unit khusus Tim Penanggung jawab Keberlanjutan di tahun 2024, maka selama tahun 2024 belum dilakukan kegiatan pengembangan kompetensi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan pada PT. BPR Palembang.

Namun untuk tahun berikutnya BPR Palembang berkomitmen akan melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh unit khusus Tim Penanggung jawab Keberlanjutan dalam penyelenggaraan penerapan keuangan berkelanjutan.

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kegiatan Identifikasi

Dilakukan dengan melakukan identifikasi pencapaian target atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebelumnya

Kegiatan Pengukuran

Dilakukan dengan melakukan pengukuran antara target dan realisasi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebelumnya

Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian

Dilakukan pemantauan pencapaian target atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebelumnya setiap periode akhir kegiatan oleh Direktur Kepatuhan bersama Tim Penanggungjawab Keberlanjutan PT. BPR Palembang. Apabila diketahui terdapat kegiatan yang belum mencapai target sesuai dengan Rencana dilakukan mitigasi dan pengendalian risiko.

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2024.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki pengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan PT. BPR Palembang secara signifikan, yaitu :

1. Pemegang Saham
2. Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya
3. Pegawai PT. BPR Palembang
4. Nasabah PT. BPR Palembang
5. Mitra Bisnis dan Masyarakat

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan memiliki peran yang signifikan dalam penerapan keuangan berkelanjutan pada PT. BPR Palembang. Pemangku kepentingan mendapat perhatian yang penting karena mereka mempengaruhi jalannya operasional PT. BPR Palembang atau terkena

dampak dari kegiatan operasional PT. BPR Palembang. Secara strategis, pemangku kepentingan turut mengembangkan dan memengaruhi kinerja PT. BPR Palembang. Karena itu, BPR Palembang senantiasa berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan

Dalam upaya memahami kebutuhan para pemangku kepentingan, PT. BPR Palembang melakukan pendekatan dengan metode sebagai berikut :

PEMANGKU KEPENTINGAN	METODE PENDEKATAN
Pemegang Saham	Melalui RUPS
Regulator	Kepatuhan Pelaporan sesuai dengan ketentuan
Pegawai	Pelatihan dan Pendidikan
Nasabah	Survei Kepuasan Nasabah
Mitra Bisnis	Perjanjian Kerjasama
Masyarakat	Program CSR

Melalui keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan, PT. BPR Palembang dapat memastikan bahwa penerapan Keuangan Berkelanjutan dapat berjalan optimal, selaras dengan regulasi, serta memberikan manfaat bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan

Peluang dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kesadaran mengenai prinsip keuangan berkelanjutan telah menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam implementasi dan praktiknya selama tahun 2024 sehingga diperlukan ditingkatkan konsistensi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, Bank mengidentifikasi adanya peluang dalam pembiayaan berkelanjutan terutama untuk melayani segmen ritel dan UMKM untuk mendorong akselerasi usaha berwawasan lingkungan di masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama penerapan keuangan berkelanjutan di BPR PALEMBANG. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bank, antara lain:

1. Kesadaran karyawan. BPR PALEMBANG di tahun 2024 pertama sekali menerapkan keuangan berkelanjutan pada pengembangan pengetahuan dan kesadaran penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
2. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah setempat, pelaku bisnis dan masyarakat

3. Kesadaran nasabah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung dan menerapkan keuangan berkelanjutan. Pengembangan organisasi, produk dan kebijakan internal yang perlu disusun dan dikembangkan memerlukan waktu dan pengetahuan yang cukup terkait Keuangan Berkelanjutan.

6.
Kinerja Keberlanjutan

1. Kinerja Ekonomi

Tabel 6.1.1. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Kinerja Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)			
Total Aset	129.612.866.776	112.860.738.766,50	85.520.188.969,87
Aset Produktif	121.167.533.150,41	104.410.163.442,21	82.365.286.605,81
Kredit/Pembiayaan Bank	98.439.467.733	82.857.332.421	62.357.386.742
Dana Pihak Ketiga	75.299.631.271,38	63.756.949.339,30	44.657.668.017,69
Pendapatan Operasional	26.284.498.777,47	21.348.573.931,64	12.860.394.062,65
Beban Operasional	17.869.745.915,18	16.111.613.293	13.367.709.037,57
Laba Bersih	6.711.671.837,71	5.197.529.325,33	-493.383.118,29
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)%	31,99%	31,50%	42,98%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif%	5,25%	7,12%	12,69%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif%	5,39%	7,32%	13,18%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif%	2,84%	2,69%	5,70%
NPL gross%	6,63%	9,22%	17,41%
NPL nett%	3,61%	6,31%	9,90%
Return on Asset (ROA)%	6,77%	5,06%	-0,60%
Return on Equity (ROE)%	21,65%	18,94%	-1,90%
Net Interest Margin (NIM)%	15,68%	15,19%	9,47%
Rasio Efisiensi (BOPO)%	67,99%	75,47%	103,94%
Loan to Deposit Ratio (LDR)%	130,73%	129,96%	77,74%

Aset dan Kredit

Total aset tumbuh signifikan dari Rp85,5 triliun di tahun 2022 menjadi Rp129,6 triliun di 2024. Aset produktif juga meningkat sejalan. Hal ini mencerminkan ekspansi bisnis yang kuat. Kredit/ pembiayaan tumbuh lebih dari 57% dalam periode dua tahun terakhir, menandakan peningkatan fungsi intermediasi.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK meningkat dari Rp44,6 triliun di 2022 menjadi Rp75,3 triliun di 2024. Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya di institusi, serta potensi penurunan cost of fund jika dikelola dengan efisien.

Pendapatan dan Laba

Pendapatan operasional meningkat dari Rp12,8 triliun menjadi Rp26,2 triliun, sedangkan laba bersih melonjak dari posisi rugi Rp493 miliar di tahun 2022 menjadi laba Rp6,7 triliun di tahun 2024. Ini merupakan pertanda membaiknya kualitas aset dan efisiensi operasional.

Tabel 6.1.2. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
Penghimpunan Dana (Rp)	18.579.398	0	0
Penyaluran Dana (Rp)	1.826.916.600	3.993.549.967	3.524.800.000
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	1.826.916.600	3.993.549.967	3.524.800.000
Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	1.826.916.600	3.993.549.967	3.524.800.000
Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan (%)	1,86	4,82	5,65

Penghimpunan Dana

Pada tahun 2024, penghimpunan dana untuk kegiatan usaha berkelanjutan mulai tercatat sebesar Rp18.579.398. Data ini belum tersedia pada tahun 2022 dan 2023 karena program simpanan pelajar (Simpel) baru mulai berlaku efektif pada Februari 2024. Hal ini menandakan langkah awal institusi dalam memperluas cakupan kegiatan keuangan berkelanjutan dari sisi pendanaan.

2. Kinerja Sosial

Komitmen Perusahaan

BPR PALEMBANG memberikan layanan merata kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat.

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR PALEMBANG menjaga kesejahteraan pegawai dengan menerapkan kebijakan pengupahan yang selaras dengan standar Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Palembang.

Kebijakan pengupahan ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah yang mengatur sistem pengupahan, sehingga setiap pegawai menerima upah yang tidak kurang dari nilai UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, BPR PALEMBANG tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kompensasi yang adil dan layak.

Selain itu, pengupahan di BPR PALEMBANG dilakukan dengan mekanisme evaluasi berkala.

Mekanisme tersebut bertujuan untuk menyesuaikan besaran gaji dengan dinamika ekonomi, inflasi, dan perkembangan nilai pasar tenaga kerja di wilayah Palembang. Proses evaluasi ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar kompensasi yang diterima pegawai selalu mencerminkan kontribusi, kinerja, serta tanggung jawab yang diemban, sehingga mendorong peningkatan semangat kerja dan loyalitas pegawai.

Kebijakan pengupahan yang diterapkan juga merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sejahtera dan kompetitif.

Dengan memberikan pengupahan yang sesuai dengan standar UMK, BPR PALEMBANG berupaya menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas operasional. Hal ini sekaligus memperkuat reputasi perusahaan sebagai lembaga keuangan yang peduli terhadap kesejahteraan sumber daya manusia, sekaligus mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan peraturan pengupahan yang berlaku.

Melalui upaya tersebut, BPR PALEMBANG berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan pegawai dengan memastikan bahwa setiap aspek pengupahan telah mengacu pada standar yang diatur oleh hukum dan kebijakan yang berlaku.

Tabel 6.2.1. Informasi Kegiatan yang Berdampak terhadap Masyarakat

Nama Kelompok / Mitra Usaha	Lokasi	Jenis Kegiatan	Jumlah Mitra / Pelaku UMKM
Pelajar	Palembang	Tabungan Simpel	1
Kelompok Petani	Banyuasin	Kredit Pertanian dan Perkebunan	41

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

BPR PALEMBANG ikut berkontribusi memberikan sebagian dari laba yang disisihkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tabel 6.2.2. Kegiatan TJSL terkait Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Kegiatan TJSL	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan
1	Sosialisasi Gemar Menabung	Menanamkan kebiasaan menabung kepada masyarakat.	Sebagai badan usaha yang bergerak dalam industri jasa keuangan, BPR berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan produk dan jasa layanan keuangan perbankan terutama yang dapat menopang pengembangan usaha. Salah satu upaya yang digalakkan adalah menanamkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Melalui tabungan masa depan keuangan akan lebih terencana dan tabungan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk untuk pengembangan usaha.

2	Penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi ke para petani.	Membantu petani dalam memperkuat permodalan dalam mendukung pengembangan usaha.	Untuk tercapainya keuangan berkelanjutan, BPR harus didukung oleh masyarakat yang ekonominya semakin meningkat. Usaha di bidang pertanian dan perkebunan dijadikan sasaran untuk peningkatan ekonominya melalui pemberian pinjaman yang lebih berpihak, sehingga pada gilirannya akan menopang pengembangan keuangan berkelanjutan bagi BPR.

3. Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL

BPR PALEMBANG mengimplementasikan operasional bank yang ramah lingkungan dengan menerapkan serangkaian kebijakan berpedoman pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sosialisasi prinsip- prinsip tersebut terus dilakukan secara konsisten guna memastikan tercapainya tujuan awal perusahaan. Pengelolaan operasional kantor yang mendukung kelestarian lingkungan diwujudkan melalui pengaturan efisiensi penggunaan bahan baku/ material, energi, dan air. Dengan langkah- langkah tersebut, selama periode pelaporan, operasional BPR PALEMBANG tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati di lingkungan Bank.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan- bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing.

Tabel 6.3.1. Uraian Penggunaan Energi

Keterangan	Penggunaan Pada Tahun Laporan
Listrik (kWh)	96.967

Volume Air dari PDAM (meter kubik)	714
Volume Air dari Sumur (meter kubik)	0
BBM (Liter)	8.312

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPR PALEMBANG senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, BPR PALEMBANG melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/jasa yang dilakukan BPR PALEMBANG selama tahun 2024 antara lain meluncurkan Program Kredit UMKM namun belum dapat terlaksana, masih dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Palembang, dan Tabungan SIMPEL telah dilakukan PKS di beberapa sekolah.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR PALEMBANG telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara kontinu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, BPR PALEMBANG secara rutin menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan guna memastikan bahwa calon nasabah maupun nasabah memperoleh pemahaman yang akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, para nasabah dapat melakukan investasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta memahami secara menyeluruh profil risiko yang melekat pada setiap produk atau layanan tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR PALEMBANG telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR PALEMBANG akan menyalurkan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR PALEMBANG pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR PALEMBANG maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR PALEMBANG belum melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2024 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

Atas pertimbangan tertentu mengingat ukuran dan kompleksitas usaha BPR PALEMBANG yang masih terbatas maka Bank belum melakukan verifikasi tertulis dari pihak ketiga yang independen dikarenakan hal tersebut bukan merupakan persyaratan dari OJK. Namun demikian Bank menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual dan telah diverikasi oleh pihak internal BPR.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR PALEMBANG yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR PALEMBANG menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR PALEMBANG memberikan akses informasi seluas- luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik *(feedback)* mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Dani Aminudin
Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
PT BPR Palembang
Jalan Sukarno Hatta No. 10 RT. 048, RW. 010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan
Telepone : 0711-5564777
E-mail : bprpalembang@bankbprpalembang.com

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

Bank Palembang
PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang
Bank Milik Pemerintah Kota Palembang

SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024 PT. BPR PALEMBANG

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan **bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 02 Mei 2025

PT. BPR PALEMBANG

SYAFRIL
Direktur Utama

Bank Palembang
PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang

SLAMET
Direktur YMF Kepatuhan

Dr. RAKHMAT, S.STP, M.SI
Komisaris

Jl. Sukarno Hatta No. 10 Rt. 048 Rw. 010
Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang
Telp : 0711-5564777
Website : www.bankbprpalembang.com

LAPORAN REALISASI PROGRAM KERJA
AKSI KEUANGAN BERKELAJUNTAN TAHUN 2024

NO	Deskripsi Kegiatan	Tanggal	Keterngan
1	Sosialisasi Pada SD 14 Palembang	09-Jul-24	Sosialisasi Simpel
2	Sosialisasi Pada SD 06 Palembang	09-Jul-24	Sosialisasi Simpel
3	Sosialisasi Pada SMP Muhammadiyah Palembang	22-Jul-24	Sosialisasi Simpel
4	Kegiatan 17 Agustus Pada Sekolah Muhammadiyah Palembang	15-Agu-24	Acara kegiatan menyambut kemerdekaan
5	Sosialisasi pada SMP Muhammadiyah Palembang	26-Agu-24	Sosialisasi Simpel
6	Sosialisasi pada SD 06 Muhammadiyah Palembang	12-Sep-24	Sosialisasi Simpel
7	Sosialisasi pada SD 06 Muhammadiyah Palembang	18-Sep-24	Sosialisasi Simpel
8	Sosialisasi pada SMP 04 Muhammadiyah Palembang	26-Sep-24	Sosialisasi Simpel pada kelas 7
9	Launcing Tabungan Simpel	21-Nov-24	Launching program simpel di SMP 9 & 10 dengan Pemkot

NO	Produk Keuangan Berkelanjutan	Jumlah	Keterangan	Tahun
1	Penghimpunan Dana	18,579,398	Tabungan Simpel	2024
2	Penyaluran Dana	1,826,916,600	Kredit Pertanian	2024

Bank Palembang

PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang

Bank Milik Pemerintah Kota Palembang

LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI

PT BPR PALEMBANG

TAHUN 2024

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Direksi	2	0	2	5.00%
2	Pejabat Eksekutif	3	1	4	10.00%
3	Pelaksana	22	12	34	85.00%
	Jumlah	27	13	40	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	S1	18	12	30	73.68%
2	D3	7	0	7	18.42%
3	SMA	2	1	3	7.89%
	Jumlah	25	13	40	100%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Tetap	16	10	26	63.16%
2	Kontrak	11	3	14	36.84%
	Jumlah	25	13	40	100%

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Di Atas 50 Tahun	2	0	2	5.00%
2	41 s/d 50 Tahun	4	1	5	12.50%
3	31 s/d 40 Tahun	13	7	20	50.00%
4	21 s/d 30 Tahun	8	5	13	32.50%
5	18 s/d 20 Tahun	0	0	0	0.00%
	Jumlah	27	13	40	100%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Baby Boomers 1946 - 1965	0	0	0	0.00%
2	Generation X 1965 - 1980	6	0	6	75.00%
3	Generation Y (millennials) 1981 - 1996	19	11	30	21.7%
4	Generation Z 1997 - 2012	3	1	4	10.00%
	Jumlah	28	12	40	100%

Bank Palembang

PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang

Bank Milik Pemerintah Kota Palembang

Nomor : 057/BPR-PLG/V/2025
Tanggal : 5 Mei 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan
Jln. Jenderal Sudirman No. 1025
Palembang 30114

Referensi:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Perihal : **Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT. BPR PALEMBANG Tahun 2024**

Mengacu pada POJK No. 51 Penerapan Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif ditegaskan BPR wajib menyampaikan Laporan Keberlanjutan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Oleh karenanya, menunjuk perihal dimaksud kami menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT. BPR PALEMBANG Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

PT. BPR PALEMBANG,

SYAFRIL
Direktur Utama

Bank Palembang
PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang

Jl. Sukarno Hatta No. 10, RtT. 048 Rw. 010
Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang
Telp : 0711-5564777
Website : www.bankbprpalembang.com